

BAB I

PENDAHULUAN

A Latar Belakang

Pelantikan presiden di Indonesia tidak hanya merupakan ritual formal, melainkan menjadi cerminan perubahan sejarah kekuasaan yang begitu signifikan, panjang dan kompleks, mulai dari masa Nabi, negara dan kerajaan luar serta kerajaan prakolonial hingga era Republik Modern. Di masa Nabi, ketika Nabi Muhammad diangkat melalui wahyu ilahi atau baiat sahabat, dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat Al-Alaq yang artinya "Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan." Ayat inilah yang menandai legitimasi spiritual tanpa ritual formal.¹ Sama halnya di negara lain, seperti Presiden Amerika Serikat yang dilantik dengan sumpah konstitusional berdasarkan Pasal II Konstitusi AS, yang sumpah berisi "Saya bersumpah bahwa saya akan setia menjalankan jabatan Presiden Amerika Serikat" ini menunjukkan mekanisme demokratis modern.² Demikian pula, di kerajaan luar dahulu, seperti Kerajaan Mesir Kuno, pelantikan atau pengangkatannya melibatkan ritual sakral dengan keabsahan ilahi, di mana firau Ramses II dinyatakan sebagai "anak Ra" melalui pelaksanaan upacara di Karnak³

Di masa kerajaan, seperti di Kerajaan Majapahit dan Mataram Islam, pelantikan raja Majapahit seperti Hayam Wuruk dilakukan melalui upacara sakral yang melibatkan doa kepada dewa-dewa dan simbol ilahi, seperti penobatan dengan mahkota dan tongkat sebagai tanda keabsahan dari langit.⁴ Melibatkan ritual naik takhta yang dipimpin oleh tokoh agama dan bangsawan tanpa pemilihan rakyat dan tanpa adanya mekanisme pemilu formal seperti sekarang.⁵

¹ Hitti. Philip K, in *History Of Arabs* (Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 1970), 45.

² Contitution Annotes, Artll.S1.C8.1.1 Oath of Office for the Presidency Generally, 1787 https://constitution.congress.gov/browse/essay/artII-S1-C8-1-1/ALDE_00013932/.

³ J. Kemp Barry, in *Ancient Egypt: Anatomy of a Civilization* (New York: Routlegde, 2006), 78.

⁴ Slamet Muljana, in *Serat Pararaton Jilid 2* (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1979), 25–26.

⁵ Yamin. M, in *Sejarah Mataram Islam* (Jakarta: Balai Pustaka, 1963), 92.

Transisi ke era kolonial Belanda pada abad ke-17 membawa perubahan radikal, di mana pengangkatan atau pelantikan pemimpin lokal seperti bupati atau sultan diatur melalui dekrit resmi dari Gubernur Jenderal yang menciptakan persilangan antara tradisi lokal dan birokrasi Eropa serta sering memicu perlawanan seperti dalam Perang Padri (1803-1837) atau Perang Aceh (1873-1904), sebagaimana yang dikatakan Ricklefs dalam bukunya, yaitu menimbulkan perlawanan kolonial, merusak otonomi adat, dan menimbulkan konflik norma kekuasaan.⁶

Pasca-kemerdekaan pada tahun 1945, sistem pelantikan berkembang menjadi konstitusional berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, di mana pergantian dari monarki absolut dan kolonialisme ke republik demokratis menghadapi tantangan seperti kekurangan norma hukum di awal kemerdekaan, evolusi pelantikan presiden transisi dari pengawasan ilahi ke pengawasan rakyat dengan warisan kolonial yang masih membayangi stabilitas pemerintahan.⁷ Pergeseran sumber legitimasi kekuasaan dari tatanan lama yang bersandar pada otoritas kosmologi/keagamaan raja-raja Nusantara menuju otoritas konstitusional yang bersandar pada “kedaulatan rakyat” sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 Ayat 2 UUD 1945, juga tidak berlangsung sebagai putusan bersih.

Transisi ini tercermin dalam sejarah pelantikan presiden Indonesia 1949-2019 yang dimulai dengan Soekarno pada tahun 1949 menjadi presiden pertama Republik Indonesia Serikat, dilanjutkan oleh Soeharto yang menjabat 5 periode, dari tahun 1967-1998 melalui mekanisme proses parlementer, selanjutnya BJ. Habibie pada tahun 1998-1999 sebagai pengganti konstitusional, Abdurrahman Wahid atau yang lebih dikenal sebagai Gus Dur pada tahun 1999-2001 melalui sidang MPR, dilanjutkan oleh putri dari Soekarno, yaitu Megawati Soekarnoputri, pada tahun 2001-2004 naik jabatan, Susilo Bambang Yudhoyono atau yang

⁶ M. Ricklefs, in *Sejarah Indonesia Modern Sejak c. 1200* (Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2007), 145.

⁷ Didik Suhariyanto, *Pergantian Presiden Indonesia*. (Universitas Brawijaya, 2013), 23 [https://repository.ub.ac.id/160842/1/Didik Suhariyanto.pdf](https://repository.ub.ac.id/160842/1/Didik%20Suhariyanto.pdf).

disingkat SBY pada tahun 2004-2014 melalui pemilihan langsung pertama, dan Joko Widodo pada tahun 2014-2019 melalui pemilu demokratis yang dilakukan.⁸

Penelitian ini secara khusus dibatasi secara temporal pada periode 1949–2019, yakni mulai dari pengakuan kedaulatan Indonesia pada 1949 hingga akhir masa jabatan pertama Joko Widodo pada 2019, untuk berfokus pada analisis pascakemerdekaan penuh meliputi Orde Lama, Orde Baru, dan Awal Reformasi tanpa menyentuh era selanjutnya, yaitu pelantikan pasca-2019, guna menjaga kedalaman analisis. Secara spasial, ruang lingkup yang berada dalam penelitian ini terbatas pada wilayah di Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan penekanan pada institusi pusat seperti MPR RI dan Mahkamah Konstitusi di Jakarta, tidak mencakup dimensi regional atau internasional kecuali adanya pengaruh kolonial dalam konteks historis, demi menghindari adanya perluasan yang tidak sesuai.

Pemilihan judul skripsi tentang pelantikan-pelantikan presiden Indonesia dari tahun 1949–2019 ini didasari oleh historinya yang signifikan dalam memahami arah perkembangan demokrasi nasional. Topik ini mengungkapkan bagaimana pemilihan presiden dan prosesi pelantikan presiden di Indonesia dari awal kemerdekaan hingga saat ini. Sejarah pelantikan presiden Indonesia dari tahun 1949 hingga 2019 ini lahir dari transformasi sistem kekuasaan sejak masa kerajaan dan kolonial hingga konstitusional, dengan menawarkan sejarah berupa gambaran pelajaran berharga tentang adaptasi negara di tengah dinamika bangsa yang penuh pergolakan. Aktualitas topik ini bisa menjadi daya tarik utama, terutama di tengah isu suksesi politik pasca-2019. Penelitian ini menunjukkan bahwa setiap pelantikan presiden memainkan peran penting dalam membentuk sejarah dan politik Indonesia. Kajian ini dapat mendorong diskusi tentang integritas pemilu dan paradigma bangsa, sehingga bisa menjadi kontribusi pada pemahaman sejarah nasional yang jarang dieksplorasi secara komprehensif.

⁸ M.C. Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern III*, 2005. 245-246

B Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, dan supaya pelaksanaan penelitian lebih terarah, maka penulis mengidentifikasi rumusan masalah yang menjadi topik pembahasan sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pemilihan presiden Indonesia yang terpilih dari tahun 1949–2019?
2. Bagaimana pelantikan presiden Indonesia tahun 1949–2019?

C Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses dan mekanisme pemilihan terpilih dari tahun 1494-2019
2. Untuk mengetahui evolusi pelantikan presiden Indonesia dari tahun 1949-2019

D Kajian Pustaka

Penelusuran dari berbagai literatur terkait topik dilakukan penulis dengan tujuan melihat adanya perbedaan antara penulis dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya. Adapun tema-tema kajian yang berkaitan dengan penelitian ini antara lain:

1. Skripsi yang ditulis oleh Dafa Nayudhistira yang berjudul *Telaah Norma Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden dalam Peraturan Perundang-undangan*. Skripsi ini merupakan karya mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah tahun 2024. Skripsi ini membahas kewenangan MPR RI dalam melantik presiden dan wakilnya hasil pemilu, menganalisis peraturan terkait, memeriksa checks and balances, serta konsep kedaulatan rakyat dan demokrasi sebagai landasan teoritis. Penelitian

dalam skripsi ini bertujuan memperjelas ketentuan konstitusional pelantikan presiden dan memberikan solusi atas potensi krisis pelantikan tersebut. Jadi, sangat berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan, di mana penulis hanya berfokus melakukan penelitian tentang bagaimana pelantikan presiden di Indonesia dilaksanakan.

2. Dalam Jurnal Majelis yang ditulis Hendri Affandi yang berjudul *Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden dan pelaksanaan sidang tahunan: Paradoks kewenangan eksklusif Majelis Permusyawaratan Rakyat*. Jurnal ini lebih berfokus pada kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI yang meliputi mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar 1945, melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden hasil pemilihan umum, serta memutuskan usul DPR untuk memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya setelah Mahkamah Konstitusi memutuskan adanya pelanggaran hukum tertentu. Walaupun dalam pembahasan yang sama, objek penelitian yang penulis lakukan dalam penelitian ini adalah prosesi pelantikan presiden dari tahun 1949–2019.
3. Dalam Jurnal Majelis yang ditulis oleh Wicaksana Dramanda yang berjudul *Pelantikan dan Sumpah Jabatan Presiden dalam Kerangka Konstitusional*. Jurnal ini membahas pentingnya proses pelantikan dan pengucapan sumpah di hadapan MPR atau DPR untuk memastikan komitmen Presiden dan Wakil Presiden untuk menjalankan amanah dan menjaga konstitusi. Ketetapan MPR menjadi dasar hukum yang kuat dalam pelaksanaannya melalui pelantikan, mendukung transparansi dan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Sangat berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan, dalam penelitian ini penulis mengkaji bagaimana prosesi pelantikan presiden Indonesia dari tahun 1949–2019.

E Metode Penelitian

Langkah penelitian yang digunakan dalam penulisan adalah metode sejarah, di mana metode sejarah adalah proses menguji dan menganalisis secara kritis

rekaman dan peninggalan masa lampau.⁹ Dalam bukunya yang berjudul *Pengantar Ilmu Sejarah*, Kuntowijoyo berpendapat bahwa metode sejarah adalah pelaksanaan petunjuk teknis tentang bahan dan heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi. Metode penelitian sejarah yang digunakan dalam penulisan penelitian ini meliputi empat tahap penelitian sejarah yang bertujuan untuk merekonstruksi suatu peristiwa sejarah.¹⁰ Kuntowijoyo memaparkan empat tahapan dalam penelitian sejarah, sebagai berikut:

1. Heuristik

Heuristik merupakan usaha para sejarawan untuk memilih suatu subjek dan mengumpulkan informasi mengenai subjek itu.¹¹ Heuristik dalam bahasa Yunani itu sendiri berarti menemukan. Dalam konteks penulisan sejarah, heuristik biasanya diartikan sebagai kegiatan sejarawan untuk mengumpulkan sumber-sumber sejarah, dan pencarian sumber bisa didapatkan dari arsip, buku, dan dokumen lainnya, baik itu sumber primer ataupun sumber sekunder.¹² Jadi bisa diartikan heuristik merupakan tahapan pencaharian dan pengumpulan sumber.

Dalam pencarian sumber, penulis mendapatkan sumber dari Perpustakaan Nasional, Arsip Nasional Republik Indonesia, Perpustakaan Batu Api, Youtube, beberapa website resmi dan juga beberapa dokumentasi resmi. Sumber yang didapatkan di antaranya:

a. Sumber Primer

Naskah:

- Naskah Pidato Presiden Soeharto, Pidato Pada Upacara Pelantikan Presiden Soeharto, Di Hadapan Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. 11 Maret 1983

⁹ Gottschalk. Loius, in *Mengerti Sejarah* (Jakarta: UI-Press, 2008). 41

¹⁰ Kuntowijoyo, in *Pengantar Ilmu Sejarah* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2013).

¹¹ Gottschalk. Loius, *Mengerti Sejarah*. 42

¹² Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*. 73

- Naskah Pidato Presiden Soeharto, Pidato Pada Upacara Pelantikan Presiden Soeharto, Di Hadapan Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. 11 Maret 1988
- Naskah Pidato Presiden Soeharto, Pidato Pada Upacara Pelantikan Presiden Soeharto, Di Hadapan Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. 23 Maret 1978.
- Naskah Pidato Presiden Soeharto, Pidato Pada Upacara Pelantikan Presiden Soeharto, Di Hadapan Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. 23 Maret 1973
- Naskah Pidato Presiden Soeharto, Pidato Pada Upacara Pelantikan Presiden Soeharto, Di Hadapan Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. 11 Maret 1993
- Clipping CSIS. Pelantikan Presiden K.H. Abdurrahman Wahid tahun 1999. Opac Perpunas – CSIS
- Naskah Pidato Presiden Soeharto, Pidato pada Upacara Pelantikan Pejabat Presiden Sambutan Pengembal Ketetapan MPRS IX Pada Penutupan Sidang Istimewa MPRS Tanggal 12 Maret 1967

Foto

- Foto Pelantikan Soeharto 27 Maret 1968, ANRI – Kempeg Jakarta 5802 UD.93, 1968
- Foto Pelantikan B.J. Habibie 21 Mei 1998, ANRI – Setneg Koleksi Khusus
- Foto Pelantikan Gusdur 20 Oktober 1999, ANRI – Inventaris Arsip Foto K.H Abdurrahman Wahid No. 77
- Foto Pelantikan Megawati Soekarnoputri November 2001, ANRI – Setneg Koleksi Khusus

- Foto Pelantikan SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) 20 Oktober 2004, Humas ANRI
- Foto Pelantikan SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) 20 Oktober 2009, DetikNews, Selasa 20 Oktober 2009, 10.35 WIB
- Foto Pelantikan Jokowi Dodo 20 Oktober 2014, Humas ANRI
- Foto Pelantikan Jokowi Dodo 20 Oktober 2019, BPMI Setpres/Laily Rachev. <https://www.presidenri.go.id/>
- Foto Pelantikan Presiden Soeharto tahun 1973, Opac Perpustakaan Jakarta IPPHOS 1973
- Foto-foto Pelantikan Presiden Soekarno sebagai Presiden RIS di Yogyakarta Bangsal Siti Hinggil 17 Desember 1949
- Foto-foto Pelantikan: Pemilihan dan Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI ke II (Soeharto & Sri Sultan Hamengkubuwono IX) dalam Sidang Umum MPR tahun 1973 di gedung MPR Senayan Jakarta
- Foto-foto Pelantikan Presiden Soeharto tahun 1950, dalam Arsip Foto Kementerian Departemen Penerangan Republik Indonesia Wilayah Jakarta 1950.

Video

- Video Pelantikan Soekarno, 17 Desember 1949, Yogyakarta. Kanal Youtube Risalah Indonesia atau dalam Indonesia Film Center <https://www.Indonesianfilmcenter.com/pages/embed/8624>
- Video Pelantikan B.J Habibie. Kanal Youtube AP. Archive yang berjudul "Indonesia: Jakarta: B.J Habibie Sworn In as New President" 21 May 1998

- Video Pelantikan Abdurrahman Wahid “Gusdur” Kanal Youtube Channel RCTI Files yang berjudul “PELANTIKAN GUS DUR SEBAGAI PRESIDEN RI KE-4”
- Video Pelantikan Megawati Soekarnoputri, Kanal Youtube Pusat Metro TV yang berjudul” Momen Pelantikan Presiden Megawati Soekarno Putri di Gedung DPR dan MPR Dok 2001”
- Video Pelantikan Susilo Bambang Yudhoyono, kanal YouTube Kanal Arsip yang berjudul “Pelantikan Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Presiden Republik Indonesia (2004)”
- Video Pelantikan Susilo Bambang Yudhoyono, kanal Youtube Metro TV yang berjudul ”Pelantikan Presiden & Wapres Terpilih SBY - Boediono Dok.2009”
- Video Pelantikan Jokowi Dodo, kanal Youtube Metro TV yang berjudul “Momen Bersejarah! Pelantikan Jokowi Sebagai Presiden ke-7 RI Dok. 2014”
- Video Pelantikan Jokowi Dodo, Kanal Youtube Sekretariat Presiden ” Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI Periode 2019-2024, Jakarta, 20 Oktober 2019”
- Video Pelantikan Soeharto menjadi Presiden dari tahun 1967-1998 di Kanal Youtube Hendri Tejo yang berjudul ”Video Asli | 7 Periode Pelantikan Presiden Soeharto (1967-1998)”
- Video Pelantikan Soeharto menjadi Presiden tahun 1998 di Kanal A.P Archive yang berjudul ”INDONESIA: PRESIDENT SUHARTO SWORN IN FOR 7TH 5 YEAR TERM UPDATE”
- Video Pelantikan Soeharto menjadi Presiden tahun 1993 di Kanal Youtube RCTI Files yang berjudul ”Pelantikan Pak Harto sebagai Presiden Republik Indonesia untuk Masa Bakti 1978-1983 (1978)”

- Video Pelantikan Soeharto menjadi Presiden tahun 1978 di Kanal Youtube Kanal Arsip yang berjudul ” Pelantikan Pak Harto sebagai Presiden Republik Indonesia untuk Masa Bakti 1978-1983 (1978)”
- Video Pelantikan Soeharto menjadi Presiden sepenuhnya oleh MPR RI tahun 1968, Kanal Youtube Bimo K.A yang berjudul ” Pelantikan Presiden Soeharto tahun 1968 di Gedung MPR RI | Presiden ke-2 Indonesia”
- Video Pelantikan Soeharto Menjadi Pejabat Presiden tahun 1967, Kanal YouTube Arsip yang berjudul ”Pelantikan Pak Harto sebagai Pejabat Presiden Republik Indonesia (1967)”
- Video Pelantikan Jokowi Dodo tahun 2019 di Kanal Youtube Sekretariat Presiden yang berjudul ”LIVE: Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI 2019-2024”
- Video Pelantikan SBY tahun 2004 di Kanal Youtube A.P Archive yang berjudul “Swearing in of President Susilo Bambang Yudhoyono”
- Video Pelantikan Soeharto tahun 1993 di kanal Youtube Official iNews yang berjudul “[FULL] Momen Soeharto Dilantik Jadi Presiden Kembali Periode 1993-1998 – Flashback”

Surat Kabar

- Surat Kabar Harian Kami ” MPR Syahkan Jenderal Suharto Sebagai Presiden RI” 23 Maret 1973
- Surat Kabar Kedaulatan Rakyat Edisi 18 Tahun 1949
- Surat Kabar De Vrije Pers ”Ochtendbulletin” tahun 1949
- Surat Kabar Kompas ”Gus Dur Resmi Presiden RI ke-4” Tahun 1999

- Surat Kabar Kompas "Bergerak Bersama Demi Indonesia Raya" Tahun 2014

b. Sumber Sekunder

- NR. Indonesia, Sekretariat Jenderal MPR RI. 2020. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Cetakan Kesembilan belas. Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia

Jurnal

- Hendri Affandi. 2022. *Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden dan Pelaksanaan Sidang Tahunan: Paradoks Kewenangan Eksklusif Majelis Permusyawaratan Rakyat*. Jurnal Majelis. Edisi 06, Desember 2022. Media Aspirasi Konstitusi. MPR RI.
- Wicaksana Dramanda. 2022. *Pelantikam dan Sumpah Jabatan Presiden dalam Kerangka Konstitusionalisme*. Jurnal Majelis. Edisi 06, Desember 2022. Media Aspirasi Konstitusi. MPR RI.
- Indarji. 2018. *Perkembangan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Indonesia*. Masalah-masalah Hukum, Jilid 47, No.1. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Kota Malang.
- Aspinall, Edward. "Elections and the Normalization of Politics in Indonesia." *South East Asia Research* 13, no. 2 (2005): 117--56.
- Sodikin. "Politik Hukum Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Dalam Sejarah Ketatanegaraan Indonesia." Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2019.
- Soerya, H.M. "Pemilihan Kepala Daerah Dalam Demokrasi Electoral." *Jurnal Masalah-Maslah Hukum* 3, no. 43 (2013): 356.

- Suharyanto, Didik. "Pergantian Presiden Indonesia." Universitas Brawijaya, 2013. Tesis, <https://repository.ub.ac.id/160842/1/Didik-Suhariyanto.pdf>.
- Winarto, Joko. "Kondisi Yogyakarta Saat Perpindahan Ibu Kota Republik Indonesia Dari Jakarta Ke Yogyakarta Tahun 1946-1949." Skripsi, Universitas Negeri Semarang, 2009.

Dokumen

- Komisi Pemilihan Umum. "Hasil Rekapitulasi Nasional Pilpres 2014." Jakarta, 2014.
- Komisi Pemilihan Umum. "Hasil Rekapitulasi Nasional Pilpres 2004 Putaran II," 2004.
- Komisi Pemilihan Umum. "Hasil Rekapitulasi Nasional Pilpres 2019." Jakarta, 2019.
- Komisi Pemilihan Umum. "Laporan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2004." Jakarta, 2004.
- Komisi Pemilihan Umum. "Laporan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2009." Jakarta, 2009.
- Komisi Pemilihan Umum. "Laporan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019." Jakarta, 2019.
- "Undang-Undang Dasar Sementara 1950, Pasal 45," n.d.
- "Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 93," 2003.
- "Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1975 Tentang Partai Politik Dan Golongan Karya Mengatur Fusi Paksa Partai-Partai Menjadi Tiga Kontestan: Golkar, PPP, PDI," 1975.

- "Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176," 2008.
- "Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182," 2017.

2. Kritik

Setelah melakukan heuristik, selanjutnya adalah kritik, di mana setelah menemukan sumber-sumber, kemudian dilakukan penilaian terhadap sumber tersebut yang meliputi kritik internal dan eksternal. Hal yang penting dari tahapan kritik adalah mengetahui nilai keabsahan atau kredibilitas sumber yang telah ditemukan.¹³

Dalam tahapan kritik ini, penulis menelusuri keaslian sumber, dan melakukan kritik eksternal pada sumber yang telah ditemukan. Kemudian untuk mengetahui kebenaran sumber, penulis melakukan proses kritik internal pada sumber yang telah ditemukan.

a. Kritik Ekstren

Kritik ekstern mempersoalkan otentisitas dari sumber, yaitu apakah sumber itu betul-betul sumber yang kita kehendaki. Kritik ekstern juga disebut kritik luar yang menyelidiki keaslian sumber.¹⁴ Adapun beberapa sumber yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

- Naskah Pidato Sambutan Pengemban Ketetapan MPRS No. IX pada Penutupan Sidang Istimewa MPRS tanggal 12 Maret 1967, Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) dalam Khasanah Sekretariat Negara: Seri Pidato Soeharto 1966-1998, sebagai lembaga resmi penyimpanan arsip negara, ANRI memiliki kewenangan dalam pengelolaan, preservasi, dan autentikasi dokumen pemerintahan

¹³ Dudung Abdurrahman, in *Metode Penelitian Sejarah Islam* (Yogyakarta: Ombak, 2011), 108.

¹⁴ Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*. Hal. 74

sehingga keaslian fisik maupun administratif arsip dapat dipertanggungjawabkan. Naskah pidato tersebut dibuat pada masa transisi pemerintahan setelah Sidang Istimewa MPRS tahun 1967 yang menetapkan Soeharto sebagai Pengemban Ketetapan MPRS No.IX/MPRS/1967 dan kemudian sebagai Pejabat Presiden. Karena berasal dari arsip resmi negara dan diproduksi pada waktu yang sama dengan peristiwa yang diteliti, sumber ini memiliki tingkat autentisitas yang tinggi.

- Foto-foto Pelantikan Presiden Republik Indonesia (RIS) Soekarno di Bangsal Siti Hinggil, Yogyakarta, 17 Desember 1949, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Foto-foto ini tersimpan di Perpustakaan yang merupakan sumber primer visual yang berasal dari dokumentasi resmi. Keaslian foto dapat diverifikasi melalui metadata koleksi, informasi katalog serta identitas lembaga penyimpanan. Sebagai institusi resmi pemerintah yang bertugas mengelola koleksi sejarah nasional, Perpustakaan memiliki standar dokumentasi dan preservasi, sehingga foto tersebut memiliki kredibilitas tinggi sebagai bukti visual suatu peristiwa sejarah.
- Video Pelantikan Soekarno, 17 Desember 1949, Yogyakarta, kanal Youtube Risalah Indonesia, sumber primer ini merupakan sumber audiovisual yang berasal dari reproduksi dokumentasi sejarah. Video pelantikan ini berasal dari Web Page Indonesia Film Center. Resolusinya masih berkualitas rendah, yaitu 4K dengan gambar hitam putih, tetapi masih bisa dilihat dan dianalisis dengan baik. Dalam deskripsi pada video channel youtube Risalah Indonesia, video ini diproduksi oleh J.B. van der Kolk, Leo Elia, dan Guus van de Berg, serta videonya dinarasikan menggunakan bahasa Belanda dengan disertai selingan musik-musik instrumental yang mendukung.

b. Kritik Intern

Tujuan utama adalah memperoleh sumber yang memiliki tingkat keakuratan atau validitas yang tinggi. Dalam kaitannya dengan kritik intern, Louis Gottschalk menyatakan bahwa setelah memastikan keaslian teks dan memahami maksud sebenarnya dari penulis, sejarawan kemudian menentukan isi kesaksian yang disampaikan oleh saksi. Selanjutnya, sejarawan juga harus menilai apakah kesaksian tersebut dapat dipercaya.¹⁵ Berikut ini adalah analisis penulis mengenai kritik sumber yang penulis gunakan:

- Naskah Pidato Sambutan Pengemban Ketetapan MPRS No. IX pada Penutupan Sidang Istimewa MPRS Tanggal 12 Maret 1967, Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) dalam Khasanah Sekretariat Negara: Seri Pidato Soeharto 1966-1998. Dari segi penampilannya, arsip menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar, kondisi kertas sudah berwarna coklat dan kaku, serta disimpan di dalam map khusus arsip berwarna putih. Dari segi isi, naskah pidato ini mencerminkan pandangan resmi pemerintahan mengenai proses peralihan kekuasaan dari Presiden Soekarno kepada Soeharto. Informasi mengenai legitimasi politik, penghormatan terhadap konstitusi, dan penyelenggaraan Sidang Istimewa MPRS dapat digunakan untuk memahami narasi resmi negara mengenai transisi kepemimpinan. Isi pidatonya bersifat normatif dan politis karena bertujuan memperoleh legitimasi publik terhadap pemerintahan baru.
- Foto-foto Pelantikan Presiden Republik Indonesia (RIS) Soekarno di Bangsal Siti Hinggil, Yogyakarta, 17 Desember 1949, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Dari segi penampilan, foto ini disimpan dalam sebuah album besar yang masing-masingnya dikategorikan setiap peristiwa penting negara. Foto ini masih mempunyai dua warna

¹⁵ Sulasman, in *Metode Penelitian Sejarah* (Bandung: Pustaka Setia, 2014), 65.

hitam dan putih dan ditampilkan dalam kondisi yang masih baik sekali untuk dilihat. Secara isi, foto-foto tersebut memperlihatkan pelaksanaan pelantikan Presiden RIS di Bangsal Siti Hinggil Yogyakarta, termasuk tata ruang upacara, tokoh-tokoh yang hadir, atribut kenegaraan, serta simbol-simbol legitimasi negara. Foto ini memberikan informasi aktual mengenai aspek visual yang tidak selalu dijelaskan dalam dokumen tertulis. Akan tetapi, foto hanya menggambarkan keseluruhan rangkaian peristiwa maupun dinamika politik yang terjadi di balik pelantikan. Oleh karena itu, interpretasi terhadap foto harus didukung oleh sumber tertulis seperti arsip pemerintah, atau berita surat kabar.

- Video Pelantikan Soekarno, 17 Desember 1949, Yogyakarta, Kanal Youtube Risalah Indonesia. Isi video memberikan gambaran mengenai jalannya prosesi pelantikan Presiden RIS, termasuk urutan acara, ekspresi para tokoh, tata upacara, penggunaan simbol negara, serta situasi pelaksanaan pelantikan. Rekaman audiovisual ini sangat membantu dalam menganalisis aspek seremonial yang sulit diperoleh melalui dokumen tertulis maupun foto. Video ini bergaya sinematik dengan memperlihatkan persiapan pelaksanaan pelantikan Presiden Soekarno di Keraton Yogyakarta, mulai dari menyoroti jalanan sekitar, warga sekitar, dan lalu lalang manusia memasuki Keraton Yogyakarta dari awal hingga selesai pelaksanaan pelantikan.

3. Interpretasi

Tahap selanjutnya dalam metode sejarah adalah interpretasi, yaitu penafsiran. Interpretasi disebut juga penafsiran atau analisis sumber-sumber yang telah menjadi data-data sejarah yang kemudian akan direkonstruksi ulang oleh penulis dalam penelitian.¹⁶ Interpretasi dapat dilakukan dengan cara membandingkan data untuk menyikapi peristiwa-peristiwa yang terjadi pada

¹⁶ Kuntowijoyo, Pengantar Ilmu Sejarah. 75

masa waktu yang sama. Jadi, untuk mengetahui sebab-sebab dalam peristiwa sejarah diperlukan pengetahuan tentang masa lalu, sehingga saat penelitian akan diketahui situasi pelaku, tindakan, dan tempat peristiwa itu.¹⁷

Teori yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah Teori Institusi yang bertujuan untuk mempertahankan dan memamerkan kekuasaan.¹⁸ Teori institusi merujuk pada aturan formal hukum (konstitusi dan prosedur) yang membentuk perilaku politik. Pada tahun 1949–1998, pelantikan dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang saat itu memiliki peran sentral dan dominan dalam memilih dan melantik presiden. Sejak tahun 2004, setelah amandemen UUD 1945, presiden dipilih langsung oleh rakyat. Fungsi MPR berubah dari memilih menjadi hanya melantik presiden hasil pemilihan. Interpretasi pada teori institusi ini akan meneliti perubahan di mana legitimasi kekuasaan bergeser dari badan perwakilan ke mandat langsung rakyat. Pelantikan menjadi ritual pengesahan hukum atas kehendak rakyat.

Dalam buku *"Inventing Tradition"* karya Eric Hobsbawm dan Terence Ranger, dalam bahasa Inggris ia menyatakan, *"Inventing traditions, it is assumed here, is essentially a process of formalization and ritualization, characterized by reference to the past, if only by imposing repetition. The actual process of creating such ritual and symbolic complexes has not been adequately studied by historians. Much of it is still rather obscure. It is presumably most clearly exemplified where a 'tradition' is deliberately invented and constructed by a single initiator"* yang menjelaskan bahwa, mengacu pada praktik budaya yang disajikan sebagai kuno atau tradisional, tetapi sebenarnya relatif baru serta diciptakan secara sadar untuk tujuan tertentu, sering kali untuk membangun kesinambungan dengan masa lalu yang dibuat-buat.¹⁹ Pada intinya, tradisi ini sering diciptakan untuk mempersembahkan kesan sejarah yang panjang dan untuk menyatukan orang-

¹⁷ Dudung Abdurrahman, *Metode Penelitian Sejarah Islam*. 45-46

¹⁸ Ramlan Surbakti, in *Memahami Ilmu Politik* (Jakarta: PT. Grasindo, 1992).

¹⁹ Eric Hobsbawm. *The Invention of Tradition, Journal of Design History*, vol. 6, 1993, <https://doi.org/10.1093/jdh/6.1.67>. 4

orang serta menciptakan identitas kolektif yang merasa adanya keterhubungan dengan masa lalu.

Dalam penelitian ini, teori *Inventing Tradition* dapat digunakan sebagai analisis untuk menunjukkan bahwa upacara pelantikan bukanlah tradisi "alamiah" yang turun-temurun, melainkan konstruksi yang diciptakan atau diadaptasi untuk perpindahan legitimasi kekuasaan dan pembentukan identitas nasional. Kaitannya menjadi relevan karena pelantikan sering kali menggabungkan elemen "tradisional" yang sebenarnya baru atau dimodifikasi. Pelantikan presiden Indonesia menjadi upacara yang diatur oleh konstitusi dan undang-undang, dimulai sejak Proklamasi Kemerdekaan 1945. Dari tahun 1949 hingga 2019, Indonesia mengalami transisi dari republik parlementer ke presidensial, dengan pelantikan yang melibatkan sumpah di hadapan MPR, penggunaan simbol-simbol seperti bendera negara, lagu kebangsaan dan unsur budaya lain di dalamnya. Pelantikan adalah satu ritual politik yang berfungsi sebagai titik balik formal dalam transfer kekuasaan dan merupakan simbol penting kedaulatan negara

4. Historiografi

Historiografi merupakan tahapan akhir dalam penelitian ini setelah pengumpulan sumber dalam tahapan heuristik, kemudian kritik, dan interpretasi. Penulis menuliskan atau mengorganisir ke dalam tulisan ilmiah yang sistematis dan juga memberikan keterangan dan penjelasan yang sesuai dengan sumber serta dapat dipahami.

Pada bagian awal rencana penelitian ini, terdapat kata pengantar yang penulis sampaikan, kemudian terdapat daftar isi guna mempermudah pembaca dalam mencari topik atau pembahasan dalam penelitian yang berjudul Pelantikan-pelantikan Presiden Indonesia dari tahun 1949–2019 ini.

Untuk mendapatkan hasil penulisan laporan penelitian yang sistematis, penulis membuat penelitian ini menjadi tiga bab dan juga subbab yang terperinci. Gambarannya sebagai berikut:

Bab I terdapat Pendahuluan yang berisi: latar belakang masalah berupa penelitian yang dilakukan; rumusan masalah berupa masalah yang dikaji

dalam penelitian; tujuan penelitian; kajian pustaka; langkah-langkah penelitian yang digunakan dalam melakukan penelitian.

Bab II, yaitu Pembahasan. Bahasan yang diangkat oleh penulis yaitu proses pemilihan presiden dari tahun 1949–2019. Pembahasan dimulai dari sistem pengangkatan presiden pada masa Republik Indonesia Serikat, mekanisme pemilihan melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat pada masa Demokrasi Terpimpin dan Orde Baru, hingga perubahan mendasar setelah reformasi yang melahirkan sistem pemilihan presiden secara langsung oleh rakyat berdasarkan hasil amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Sehingga pada bab ini sedikit menekankan sistem politik Indonesia, perubahan dasar hukum, serta faktor-faktor historis yang memengaruhi transformasi mekanisme pemilihan presiden pada setiap periode.

Bab III, yaitu Pembahasan yang berisi Pelantikan-Pelantikan presiden Indonesia dari tahun 1949-2019 sebagai sebuah ritual kenegaraan yang mengalami perkembangan sekaligus mempertahankan unsur-unsur kesinambungan. Pada bab ini diuraikan setiap pelantikan presiden berdasarkan konteks sejarahnya, meliputi pelaksanaan, dasar konstitusional, tata upacara, simbol-simbol negara, serta situasi politik yang melatarbelakanginya. Analisis tidak hanya diarahkan pada aspek seremonial, tetapi juga pada kekuasaan negara. Sehingga, pelantikan dipahami sebagai ritual yang secara terus-menerus direproduksi untuk membangun legitimasi, memperkuat identitas nasional, dan menegaskan kesinambungan institusi negara meskipun terjadi perubahan pada rezim politik setiap zaman.

Bab IV, adalah kesimpulan dari penelitian ini. Kesimpulan disimpulkan dari apa yang dibahas dalam pembahasan penelitian ini. Selain itu, terdapat saran yang ingin penulis sampaikan mengenai penelitian ini.